

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah tujuan utama pada setiap negara dalam upaya memperoleh kesejahteraan masyarakat, berhubungan erat dengan kegiatan produksi barang dan jasa, dimana semakin banyak hasil produksi barang atau jasa berarti semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu penyakit dalam ekonomi sehingga perlu untuk dilakukan tindakan penyembuhan atau dikurangi. Pembangunan suatu ekonomi merupakan pembahasan yang menarik karena terdiri dari bermacam dinamika secara mikro ataupun makro, didalam suatu pembangunan dapat terjadi dampak positif atau negatif sebab itu diperlukan suatu indikator yang digunakan untuk tolak ukur dalam pembangunan. Negara dikatakan sukses apabila terdapat pembangunan ekonominya bisa mengatasi tiga masalah yang ada dalam pembangunan, masalah tersebut yaitu adanya jumlah kemiskinan yang terus mengalami peningkatan, adanya pendistribusian pendapatan yang memburuk, dan tidak variatifnya lapangan pekerjaan yang bisa mengakibatkan ketidakmampuan menyerap tenaga kerja (Kuncoro, 2010).

Bank dunia merupakan suatu organisasi dunia yang fokusnya pada masalah pemberantasan kemiskinan yang mempunyai impian mewujudkan dunia dengan tidak adanya kemiskinan. United Nation Development Program (UNDP) menjadi

salah satu program untuk mengurangi kemiskinan sebagai tujuan pertama dalam programnya (Fereita, 2011).

Kemiskinan merupakan keadaan dimana tidak ada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan tersebut disebabkan oleh adanya kurangnya pemasukan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Menurut Bappenas (2004), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan merupakan keadaan yang dimana seseorang atau sekelompok orang tidak bisa untuk memenuhi hak dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang baik. Hak-hak dasar tersebut antara lain seperti tercukupinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan, sumber daya alam, dan hak untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan baik sosial maupun politik.

Menurut Arsyad (2010), menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia bersifat multidimensi. Yang dimaksud multidimensi yaitu adanya beberapa aspek baik seperti aspek primer dan aspek sekunder. Pengertian aspek primer meliputi miskin aset, organisasi sosial politik, keterampilan, dan juga pengetahuan yang kurang, sedangkan pengertian aspek sekunder yaitu adanya miskin jaringan sosial, sumber keuangan, dan juga informasi. Selain itu juga adanya persoalan kemiskinan merupakan masalah kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan persoalan rendahnya tingkat konsumsi dan

pendapatan saja namun juga dengan rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, dan ketidakmampuannya untuk berpartisipasi dalam suatu pembangunan dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Kemiskinan merupakan salah satu yang akan selalu dihadapi oleh manusia. Masalah dalam kemiskinan itu sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri dari implikasi permasalahannya dapat melibatkan seluruh aspek manusia, walaupun sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah untuk manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada pada kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan (Suliswanto, 2010).

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Provinsi Pulau Sumatera dan Nasional

Provinsi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Aceh	848.44	872.61	839.49	819.44
Sumatera Utara	1.455.95	1.453.87	1.324.98	1.282.04
Sumatera Barat	371.56	364.51	357.13	348.22
Riau	515.4	514.62	500.44	348.22
Jambi	289.8	286.55	281.69	274.32
Sumatera Selatan	1.101.19	1.086.92	1.068.27	1.073.74
Bengkulu	328.61	316.98	301.81	302.3
Lampung	1.169.6	1.131.73	1.097.05	1.063.66
Kep. Bangka Belitung	72.76	74.09	76.26	68.38
Kep. Riau	120.41	125.37	131.68	128.46
Nasional	28.005.39	27.771.22	25.949.8	25.144.72

Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi pulau sumatera dimana Provinsi Bengkulu dari tahun 2016 hingga tahun 2019

menunjukkan terus menurunnya angka kemiskinan yang cukup signifikan dari tahun ketahun, dimana tahun 2018 sempat terjadi penurunan yaitu sebesar 301.81 ribu jiwa tetapi pada tahun 2019 angka kembali naik 302.3 ribu jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah menjadi permasalahan yang mendasar. Oleh karena itu pertumbuhan penduduk yang tidak dapat terkendali akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan (Saputra, 2011, h 8).

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)
1	2012	1 766 794
2	2013	1 814 357
3	2014	1 884 788
4	2015	1 874 944
5	2016	1 904 793
6	2017	1 934 269
7	2018	1 999 539
8	2019	2 001 578

Sumber:Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012-2019 jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2013 penduduk Provinsi Bengkulu berjumlah 1.814,357 (ribu jiwa) dan pada tahun 2019 kenaikan menjadi 2.011,578 (ribu jiwa). Pada setiap tahun jumlah penduduk dalam suatu tempat atau daerah seiring waktu terus bertambah dan tergantung dari jumlah kelahiran. Jumlah penduduk dapat menyebabkan masalah

bagi pemerintah jika tidak bisa ditangani, karena jumlah penduduk setiap tahun bertambah maka akan menyebabkan angka kemiskinan tinggi.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan dalam berbagai kegiatan ekonomi pada suatu daerah dalam suatu periode. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa PDRB yang semakin meningkat disuatu wilayah maka semakin besar potensi pendapatan di daerah tersebut (Hapsor, 2013). Kondisi PDRB di Provinsi Bengkulu menunjukkan kenaikan dari tahun 2012-2019. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp46,36 triliun, PDRB Provinsi Bengkulu pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2019 sebesar 4,79 persen bila dibandingkan terhadap perekonomian pulau sumatera secara parsial menempatkan Provinsi Bengkulu berada diposisi kelima tertinggi di Sumatera.

Tabel 1. 3
PDRB Provinsi Bengkulu (ADHK 2010) Tahun 2012-2019

No	Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)
1	2012	32 363 037.83
2	2013	34 326 371.68
3	2014	36 207 145.91
4	2015	38 066 005.72
5	2016	40 076 543.83
6	2017	42 073 515.59
7	2018	44 164 110.00
8	2019	46 345 454.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Gini Ratio merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Menurut (Barber, 2008) dalam *Annim et al* (2012) melihat hubungan antara kesenjangan dan kemiskinan sebagai hubungan yang pragnatis, yaitu bahwa kesenjangan menyebabkan kemiskinan semakin parah. Kondisi di Provinsi Bengkulu sendiri berada pada tabel 1.3.

Tabel 1. 4
Gini Ratio di Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2019

No	Tahun	Gini Ratio
1	2012	0.360
2	2013	0.372
3	2014	0.355
4	2015	0.371
5	2016	0.354
6	2017	0.349
7	2018	0.355
8	2019	0.329

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa gini ratio di Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi dari tahun 2012 hingga pada tahun 2019, dimana pada tahun 2013 memiliki nilai koefisien gini ratio tertinggi tercatat 0,372 dan terjadi penurunan di tahun 2019 tercatat 0,329, dengan ini menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi ke-17 dari 34 di Indonesia.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain yaitu pendidikan. Menurut (Amalia,2012) Pendidikan merupakan jembatan untuk

menujumas depan suatu bangsa, karena oleh itu pendidikan bersangkutan dengan karakter pembangunan dan pertahanan jati diri seseorang didalam suatu bangsa. Seseorang harus memiliki pendidikan kejenjang yang lebih tinggi agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Disaat orang bekerja mendapatkan gaji yang tinggi maka seseorang harus memiliki pendidikan yang tinggi pula. Karena jika pendidikan mereka tinggi maka mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel 1. 5
Persentase Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2019

No	Tahun	Pendidikan
1	2012	8.01
2	2013	8.09
3	2014	8.28
4	2015	8.29
5	2016	8.37
6	2017	8.47
7	2018	8.61
8	2019	8.73

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Peningkatan presentase penduduk yang lulus pendidikan menengah pertama (SMP) pada setiap wilayah atau daerahnya menunjukkan bahwa adanya indikasi kebijakan wajib belajar 9 tahun telah berhasil. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan bahkan kebodohan secara sistematis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kemiskinan bisa menjadikan kebodohan dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan (Winardi, 2010).

Angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih tinggi sehingga pemerintah memerlukan penanganan yang saling berintegritas dengan didukung data yang

akurat, sehingga sasaran kemiskinan mampu diketahui sesuai target yang dituju. Dengan adanya Sistem Informasi Basis Data Kemiskinan Terpadu (SIBAKAT) pemerintah mampu menyambut baik dan memanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan sebagai salah satu indikator yang harus dicapai. Untuk itu perlunya analisa kembali kemiskinan yang terjadi di Provinsi Bengkulu agar bisa diketahui tentang perbedaan kondisi dan perkembangan kemiskinan terutama faktor-faktor (PDRB, Gini Ratio, dan Pendidikan) yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Bengkulu tersebut, agar bisa diambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dan perbedaan kemiskinan di Provinsi Bengkulu bisa dikurangi apabila disikapi dengan kebijakan yang tepat, perbedaan angka kemiskinan yang tajam bisa terjadi dan dapat memicu kecemburuan sosial menyebabkan konflik didaerah lainnya, sehingga nantinya dapat terjadi peningkatan jumlah kemiskinan yang semakin besar disetiap daerahnya di Provinsi Bengkulu. Pada hakikatnya pembangunan daerah didisarankan tidak hanya dipusatkan perhatiannya pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut menurut Esmara dalam ilmu ekonomi dikemukakan berbagai teori yang membahas tentang bagaimana pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan (Dentisna, 2008).

Faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah jumlah penduduk karena pada setiap tahun jumlah penduduk dalam suatu tempat/daerah akan bertambah tergantung dari jumlah kelahiran. Jumlah penduduk akan menjadi masalah bagi

pemerintah jika tidak bisa dikendalikan, karena jika jumlah penduduk setiap tahun bertambah maka akan menyebabkan angka kemiskinan juga tinggi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dalam suatu periode PDRB itu merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir yang didapat dari seluruh unit ekonomi (BPS, 2016).

Koefisien gini ratio menurut BPS berdasarkan pada kurva lorenz, ialah sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran gini ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan yang mempunyai selang nilai antara 0 sampai 1. Apabila gini ratio mendekati nol berarti menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan apabila gini ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Faktor yang menyebabkan kemiskinan selanjutnya adalah pendidikan karena sudah menjadi kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan

negara. Penelitian yang dilakukan oleh Hong dan Pandey (2007) menyimpulkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk menjadi miskin.

Berdasarkan yang sudah diuraikan diatas menunjukkan bahwa faktor terjadinya kemiskinan perkapita adalah adanya faktor internal berupa kebutuhan yang harus segera terpenuhi tetapi tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam berusaha mengelola sumber daya yang dimiliki (keterampilan yang tidak mencakup, tingkat pendidikan terbatas dan lain-lain). Faktor eksternal berupa bencana alam yaitu seperti krisis ekonomi serta tidak adanya pemihak berupa kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh PDRB, gini ratio, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan perkapita kabupaten/kota provinsi Bengkulu tahun 2012-2019.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan perkapita di Provinsi Bengkulu tahun 2012-2019?
2. Bagaimana pengaruh gini ratio terhadap tingkat kemiskinan perkapita di Provinsi Bengkulu tahun 2012-2019?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan perkapita di Provinsi Bengkulu tahun 2012-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan perkapita di Provinsi Bengkulu tahun 2012-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gini ratio terhadap tingkat kemiskinan perkapita di Provinsi Bengkulu tahun 2012-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan perkapita di Provinsi Bengkulu tahun 2012-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis penelitian ini dapat digunakan sebagai media untuk mengembangkan diri dan juga untuk mengimplimentasikan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama dibangku kuliah pada program S1 jurusan Ekonomi Pembangunan.
2. Bagi pengambil kebijakan diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi baru bagi para pengambil kebijakan dalam memahami masalah dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemsikinan yang ada di Provinsi Bengkulu dan daerah lainnya.

1.5 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Perkapita di Provinsi Bengkulu tahun 2012-2019.
2. Diduga Gini Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan Perkapita di Provinsi Bengkulu tahun 2012-2019.
3. Diduga Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Perkapita di Provinsi Bengkulu tahun 2012-2019.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesisi, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori dan studi empiris terkait yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dijadikan sebagai acuan dasar penelitian.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari data dan sumber data, teknik pengumpulan data, model, alat analisis, dan definisi operasional.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu terkait permasalahan yang diangkat.

Bab V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.